

MITIGASI GEREJA TERHADAP POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Janter Efrata Rano Baki

Gereja Masehi Injili di Timor
Jln. S. K. Lerik, Kota Baru, Kupang, Nusa Tenggara Timur
janterbaki@gmail.com

Abstract

The threat of Identity Politics has created divisions and feuds among Indonesian society, which is rich in ethnicity, religion and race, including this conflict being brought into the context of the church. This article aims to offer an alternative through church mitigation theology for congregation members to respond to the challenges of Identity Politics in the pre- and post-2024 Election context and applies to the continuation of the Election in Indonesia. This article is qualitative in nature with a literature study approach. The findings in this article are that God's government (theocracy) which is internalized in the lives of congregation members empowers them to minimize and anticipate the challenges of Identity Politics by having the courage to state the truth, not compromising with all forms of crime and violence in Identity Politics, and having the courage to build relationships with every group that has certain interests while maintaining integrity as a child of God to avoid politics in the name of religion, exploitation of SARA, money politics and hoax news.

Keywords: *Indonesia, Identity Politics, Church Mitigation Theology, Kingdom of God, Model Jesus Relationship.*

Abstrak

Ancaman Politik Identitas telah menimbulkan perpecahan dan perseteruan selama ini di antara masyarakat Indonesia yang kaya dengan suku, agama, dan ras, termasuk konflik itu dibawa masuk ke dalam konteks bergereja. Artikel ini bertujuan untuk menawarkan alternatif melalui teologi mitigasi gereja bagi anggota jemaat merespons tantangan Politik Identitas dalam konteks pra dan pasca Pemilu 2024 dan berlaku dalam keberlanjutan Pemilu di Indonesia. Artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan dalam artikel ini adalah pemerintahan Allah (*teokrasi*) yang terinternalisasi dalam kehidupan anggota jemaat memberdayakan mereka meminimalisir dan mengantisipasi tantangan Politik Identitas dengan berani menyatakan kebenaran, tidak berkompromi dengan segala bentuk kejahatan dan kekerasan dalam Politik Identitas, dan berani membangun relasi dengan setiap kelompok yang memiliki kepentingan tertentu sekaligus mempertahankan integritas sebagai anak Allah terhindar dalam politik atas nama agama, eksploitasi SARA, politik uang, dan berita hoaks.

Kata Kunci: Indonesia, Politik Identitas, Teologi Mitigasi Gereja, Kerajaan Allah, Model Relasi Yesus

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa dengan peradaban yang beragam baik itu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Indonesia terdiri atas banyak kelompok yang membutuhkan kemampuan beradaptasi satu sama lain. Perbedaan budaya, agama, dan bahasa membuat komunikasi dan keterlibatan menjadi sulit. Karena itu, sangat penting bagi orang Indonesia mengenali setiap perbedaan yang ada dan menerimanya sebagai bagian kekayaan bangsa. Jika tidak dikelola secara benar, maka bangsa Indonesia rentan terhadap konflik dan isu-isu terkait SARA. Potensi timbulnya isu-isu SARA menimbulkan ketegangan antar kelompok yang bermuara pada konflik. Sehingga, masyarakat perlu memupuk nilai toleransi, kerukunan, dan saling menghormati satu sama lain.¹

Politik Identitas merupakan salah satu pergumulan dan masalah serius yang nampak dari Pemilu setiap tahunnya, termasuk dalam konteks Pemilu tahun 2024. Politik Identitas merupakan alat strategi eksploitasi oleh kelompok elit politik tertentu yang dilakukan dengan cara memanfaatkan suatu kelompok tertentu berdasarkan persamaan identitas meliputi ras, suku, gender, dan agama.² Hal demikian menjadi senjata utama dalam aktivitas politik, seperti memperkuat argumentasi, melucuti senjata lawan, dan menjatuhkan lawan politik dengan mengangkat masalah seperti budaya dan etnis. Kelompok elite politik tertentu menggunakan identitas agama mereka untuk terlibat dalam propaganda politik dan pertarungan kekuasaan dengan tujuan memenangkan pertarungan politik di Indonesia.³

Isu Politik Identitas telah dikaji oleh banyak peneliti terdahulu seperti riset yang dilakukan oleh Idrus Ruslan dengan pendekatan lintas agama, Ia memfokuskan pada upaya sejauh mana identitas umat beragama di dalam ruang demokrasi mampu menghadapi tantangan Politik Identitas di Indonesia.⁴ Selain itu, I Putu Sastra Wingarta, dkk., dengan perspektif Ketahanan Nasional Republik Indonesia memfokuskan kajiannya pada upaya meningkatkan literasi digital tentang edukasi politik untuk meminimalisir dampak dari Politik Identitas, yakni melalui sinergi antara

Kemendagri RI, Kemenkominfo RI, dan Pemimpin Partai Politik.⁵ Salah satu contohnya, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil memberikan edukasi politik kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan Politik Identitas.⁶ Riset Leli Salman Al-Farisi memfokuskan pada langkah strategis pemerintah mengelola keragaman bangsa, pluralisme, dan menata hubungan antara Islam dan Pancasila.⁷ Hal demikian juga yang diupayakan oleh gereja dalam mengelola keragaman bangsa dan pluralisme. Riset Wasinthon F. Sianipar yang mengkaji Etis Teologis dalam upaya pelayanan pembinaan tentang politik berdasarkan perspektif iman Kristen.⁸ Selain pelayanan pembinaan politik, Djoys A. Rantung dengan perspektif kajian teologis keadilan memberikan perhatian pada upaya sinergi bersama umat beragama lain yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian sebagaimana keteladanan Yesus yang memperjuangkan hak-hak orang lemah dari penindasan struktural oleh kaum elit, pemuka agama.⁹

Artikel ini memfokuskan pada upaya mitigasi gereja yang menjadi urgen bagi kehidupan anggota jemaat, sebagai bagian dari masyarakat yang menghadapi dampak dan pengaruh dari Politik Identitas dalam konteks pra dan pasca Pemilu di Indonesia. Dalam ranah gerejawi, secara spesifik, riset terdahulu oleh Wasinthon F. Sianipar dan Djoys A. Rantung belum menawarkan solusi mitigasi gereja. Wasinthon F. Sianipar menyumbang pelayanan pembinaan politik yang menyentuh aspek edukasi Politik Identitas bagi jemaat. Djoys A. Rantung menyumbang sinergi lintas agama yang menyentuh aspek aksi bersama terhadap Politik Identitas. Sedangkan artikel ini menyumbang mitigasi gereja yang menyentuh aspek kedewasaan moralitas dan spiritualitas anggota jemaat mengantisipasi dan meminimalisir tantangan Politik Identitas.

Artikel ini bertujuan membangun sebuah teologi mitigasi gereja berdasarkan nilai etika Kerajaan Allah dan model relasi Yesus yang merupakan fondasi kokoh bagi kedewasaan moralitas dan spiritualitas anggota jemaat menghadapi politik identitas. Artikel ini hendak menegaskan mitigasi gereja berdasarkan nilai etika Kerajaan Allah dan model relasi Yesus memberdayakan setiap anggota jemaat menjadi kritis, selektif, guna meminimalisir pengaruh dan dampak politik identitas dalam konteks pra dan pasca Pemilu 2024 maupun berkelanjutan dalam Pemilu di Indonesia. Empat temuan dalam artikel antara lain adalah pertama, akar masalah politik identitas dalam konteks

pemilu di Indonesia. Kedua, politik Kerajaan Allah. Ketiga, model etika Kerajaan Allah sebagai mitigasi gereja terhadap isu Politik Identitas. Keempat, model relasi Yesus terhadap politik identitas.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka ini meneliti banyak informasi dari referensi artikel jurnal mengenai kerangka teori yang kemudian dibangun oleh penulis sebagai alternatif masalah.¹⁰ Berdasarkan pendekatan ini, Penulis menggunakan tujuh referensi tentang teori etika Kerajaan Allah dan model relasi Yesus untuk membangun sebuah teologi mitigasi gereja sebagai landasan pemecahan masalah politik identitas di Indonesia.

Empat langkah yang ditempuh oleh Penulis dalam studi pustaka, yakni: Pertama, tahap pemilihan literatur yang relevan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tahap ini penulis menggunakan sumber artikel jurnal yang relevan terkait topik penelitian. Kedua, tahap membaca literatur dan membuat resensi kritis. Penulis menggali artikel jurnal yang telah dipilih untuk menemukan ide dan pemikiran yang relevan dengan topik. Ketiga, tahap pengelompokkan dan mensintesis ide sesuai pokok topik penelitian. Pada tahap ini Penulis telah mengetahui bagian mana dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian Penulis membuat pernyataan-pernyataan yang secara konseptual yang merinci topik, variabel atau analisis penelitian. Keempat, menghasilkan sebuah naskah. Tahap ini Penulis mengkolaborasikan ide dan pemikirannya berdasarkan ide-ide dan hasil riset dari artikel jurnal yang terkait tantangan Politik Identitas, dan teori Kerajaan Allah dan model relasi Yesus sebagai alternatifnya.¹¹

Dalam kepenulisan artikel ini memakai pendekatan argumentatif karena itu artikel diuraikan dengan sistematika yang tersusun yakni padabagian pertama Penulis akan menggali akar masalah Politik Identitas mulai dari konteks sejarah dan kekinian yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dan Gereja pada masa kini. Pada bagian kedua Penulis akan menjembatani politik Kerajaan Allah dalam kesaksian Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) ke dalam konteks anggota jemaat sebagai agen Kerajaan Allah yang mentransformasi Politik Identitas. Bagian ketiga Penulis akan mengemukakan nilai-nilai etika Kerajaan Allah menjadi daya mitigasi gereja terhadap

isu Politik Identitas. Dan keempat, Penulis akan menggunakan model relasi Yesus sebagai respons anggota jemaat terhadap tantangan Politik Identitas. Pada akhirnya, artikel ini menyatakan bahwa teologi mitigasi gereja sebagai alternatif masalah Politik Identitas, dan berlaku dalam keberlanjutan Pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Masalah Politik Identitas dalam Konteks Pemilu di Indonesia

Politik Identitas dalam sejarah bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi empat yakni etnisitas, agama, dan ideologi politik.¹² Henk S. Nordholt menandakan, bahwa politik identitas timbul dari bentukan Negara Orde.¹³ Pada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto, kalangan Islam merasa berjasa karena membantu pemerintah untuk menumpas anggota PKI, sehingga mereka mempunyai harapan yang besar terhadap pemerintahan baru, yaitu mereka ingin memperjuangkan cita-cita untuk mendirikan negara Islam lewat jalur politik. Namun, Pemerintah Orde Baru sangat menekan gerakan politik Islam yang ingin menyalurkan keinginannya melalui pemerintahan baru. Artinya keinginan dan harapan kalangan politik Islam yang ingin mendirikan negara Islam lewat jalur politik pada pemerintahan baru menghadapi tantangan yang besar, dan itu berarti harapan tersebut harus dikesampingkan, karena pemerintahan saat itu sudah mempunyai agenda politiknya untuk menjalankan pemerintahannya.¹⁴

Kebijakan pemerintah saat itu melemahkan politik identitas Islam, dengan empat alasan. Pertama, tidak ada daerah yang didiami penduduk asli, karena migrasi dan transmigrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Akibatnya mempengaruhi sosial budaya dan politik tercabut dari akar historis. Kedua, mengantisipasi terbentuknya kelas dalam masyarakat sehingga isu SARA dikendalikan, terkecuali dari otoritas pemerintah. Ketiga, pengaruh modernisasi yang melunturkan nilai-nilai etnis dan agama. Keempat, tata kelola pemerintah bertujuan untuk tidak terjadi tumpang tindih antara agama dan suku. Kebijakan demikian bertujuan agar pihak tertentu tidak memanfaatkan politik identitas. Namun kenyataannya, mereka mencari perlindungan di balik suku dan agama. Akan tetapi, lambat laun, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi ancaman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, sebab adanya sentimen primordial masa lampau yang tampak dan mengahdirkan konflik. Beberapa dampak

yang terekam sejarah pada masa politik tahun 1995 sampai Orde Baru di Indonesia antara lain; pertikaian Dayak dan Madura, kekerasan politik pada Mei 1998 di Jakarta, serta pengusiran etnis Buton-Bugis dan Makassar dari Ambon.¹⁵

Azyumardi Azra, seorang akademisi dan cendekiawan muslim Indonesia menjelaskan, bahwa secara global Politik Identitas hanya terjadi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Secara khusus, Politik Identitas Islam yang terjadi di Indonesia muncul sejak tahun 1999.¹⁶ Kemudian tampak wacana dan konsepsi tentang populisme politik Islam dalam kaitannya dengan pencapaian kelompok Islamis dalam mengalahkan pasangan Cagub-Cawagub Ahok-Djarot dari pasangan Anies-Sandi Cagub-Cawagub dalam Pilkada Jakarta. Terpilihnya Anies-Sandi merupakan keberhasilan populisme dalam Politik Identitas Islam yang sedang naik daun dan mungkin akan mendapatkan daya tarik di Pilkada 2016/2017, serta Pemilu Legislatif dan Presiden 2019. Selain itu, munculnya populisme politik Islam terkait dengan serangkaian gerakan massa di kalangan umat Islam Indonesia. Alhasil, gelombang aksi yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam ini dimulai pada 14 Oktober 2016 (1410), 28 Oktober 2016 (2810), 4 November 2016 (411), 2 Desember 2016 (212), 11 Februari 2017 (112), 21 Februari 2017 (212 jilid 2), 31 Maret 2017 (313), dan aksi 5 Mei 2017 (Aksi 55). Aksi demikian terjadi karena menyangkut harga diri dan martabat dalam komunitas dari identitas agama tersebut. Fatalnya mereka berupaya agar agama menjadi ideologi dan memiliki sikap anti dengan kelompok lainnya.¹⁷

Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu 2024 mengifokasikan bahwa Presiden Ir. Joko Widodo hendak memberikan himbauan secara resmi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, bahwa *“Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama Politik Identitas yang mengedepankan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024.”* Selain itu, Joko Widodo meminta agar memberikan edukasi politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.¹⁸

Sejumlah isu Politik Identitas yang mengancam keutuhan Indonesia sebagai bangsa, antara lain: (1) Politik Identitas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembelajaran dari Pemilu 2019, adanya elit politik tertentu yang mempersoalkan ideologi negara, yakni Pancasila. Hal tersebut belum

pernah terjadi dalam sejarah Indonesia; (2) Politik Identitas menimbulkan permusuhan dan adu domba sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Indonesia; (3) Politik Identitas mengancam pluralisme di Indonesia, misalnya kebebasan beragama; (4) Politik Identitas menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik.¹⁹

Politik Kerajaan Allah (*Teokrasi*)

Kata *teokrasi* dari Bahasa Yunani “*theokratia*”, *theo* artinya Allah, dan *kratos* artinya kuasa/pemerintahan. Karena itu, *teokraasi* berarti “Pemerintahan Allah” atau “Kerajaan Allah”. *Teokrasi* merujuk pada pemerintahan oleh Allah dalam bentuk penyertaan dan pertolongan Allah atas umat-Nya. Para umat hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam kesaksian Perjanjian Lama, Tuhan Allah yang transenden memimpin bangsa Israel secara langsung. Tuhan Allah turut menawarkan stabilitas, kedamaian, dan kemakmuran bagi mereka yang takut akan Dia dan menjaga perjanjian yang dibuat-Nya di Gunung Sinai. Tuhan Allah memerintah bangsa Israel sebagai Raja, berbeda dengan model pemerintahan raja di dunia. Pemerintahan Allah diilustrasikan sebagai kerajaan orang beriman dan setia kepada Tuhan Allah melalui aturan-Nya (Kel. 19:5-6). Tuhan Allah memilih utusan-Nya sebagai juru bicara bagi bangsa Israel. Sebagai utusan/wakil Tuhan Allah, ia diberi kesempatan untuk melaksanakan pemerintahan Tuhan Allah sehubungan untuk menyatakan hukum, memberikan berkat, meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan Allah, dan segala kewajiban juru bicara umat-Nya.

Pemerintahan Allah beserta pemimpin bangsa Israel, yakni nabi dan raja. Musa dipanggil dan dipimpin secara langsung oleh Tuhan Allah terhadap perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir hingga ke perjalanan padang gurun. Tuhan Allah berkenan kepada Musa selama Musa taat dan setia pada-Nya. Namun Musa tidak memimpin sampai di Kanaan. Yosua menggantikan Musa. Yosua bergumul dengan pembagian kepemilikan tanah atas kedua belas suku Israel sesuai ketetapan Tuhan Allah. Perkembangan selanjutnya, bangsa Israel membutuhkan seorang raja. Uniknya, raja yang diangkat harus mempresentasikan pemerintahan Allah. Setiap raja dipilih dan diurapi Tuhan Allah. Karena itu, ia harus setia dengan hukum Tuhan Allah dan menjadi alat untuk menyatakan kerajaan-Nya. Tuhan Allah memilih Saul sebagai raja pertama bangsa Israel (1 Sam. 10:24). Di saat Saul tidak setia (1 Sam. 15:28), maka

Tuhan menggantikannya dengan Daud (1 Sam. 16:11-13). Dalam kesaksian Perjanjian Lama, seorang raja yang terpilih bertanggung jawab penuh dalam memelihara kehidupan umat Israel tetap kudus dan memimpin secara bertanggung jawab penuh pada-Nya. Selama Kerajaan Israel berdiri sampai pada kejatuhan, Tuhan Allah turut berperang dengan bangsa-bangsa lain. Dalam masa pembuangan, Tuhan Allah berkenan memanggil nabi-nabi menjadi perwakilan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Peristiwa kepulangan dari pembuangan Babilonia merupakan kasih Allah kepada bangsa Israel.²⁰

Menurut kesaksian Perjanjian Baru, Yesus memberitakan Allah dan pemerintahan-Nya. Allah adalah Pencipta yang mengatur segala sesuatu di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bangsa Israel mengharapkan Kerajaan Allah yang telah dinubuatkan para nabi bercorak politis, yakni mereka mengharapkan Yesus sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus mendorong mereka hidup benar untuk menyongsong kedatangan pemerintahan Allah, yakni melalui tindakan kasih dan pengampunan.²¹ Esensi Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dimulai dalam pertobatan dan iman kepada Injil Kristus (Mat. 4:17; Mrk. 1:15). Yesus menetapkan standar moral Kerajaan Allah melalui Khotbah di Bukit (Mat. 5-7; Luk. 6:17-49). Yesus memberikan penekanan yang kuat pada landasan moral kehidupan orang percaya dan bagaimana hal itu berdampak pada setiap orang yang tinggal dalam kerajaan-Nya. Wujud dari khotbah demikian niscaya digenapi saat Tuhan Allah sebagai Raja (1 Kor. 15:28).²² Karena itu, Kerajaan Allah adalah sebuah visi keselamatan yang dipimpin oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia yang penuh dosa. Kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus dengan berbagai cara, yakni melalui perumpamaan dan mukjizat. Sejak Yesus hadir di dunia dan berada di tengah-tengah bangsa Israel, maka disitulah Kerajaan Allah telah didirikan dan berdiam di antara manusia. Lewat karya Yesus, Tuhan Allah memerintah di dunia melalui pemberitaan penebusan dan kebenaran melalui firman dan tindakan-Nya. Kerajaan Allah telah hadir, namun akan mencapai kepenuhan saat akhir zaman (eskatologis). Di masa kini gereja sebagai perpanjangan tangan Allah dan menjadi saksi pewartaan Kerajaan Allah.²³ Pandangan Fereddy Siagian dan Fredy Simanjuntak selaras dengan pemikiran George E. Ladd, sebagaimana dikutip Elisua Hulu, bahwa Gereja merupakan alat

Kerajaan Allah.²⁴ Thomas Ly dalam temuan risetnya berjudul *Kerajaan Allah dan Transformasi Sosial: Dialektika Kedatangan Kerajaan Allah dan Implikasi Masa Kini* menandakan, bahwa “Gereja dipanggil untuk menjadi paguyuban eskatologis yang transformatif, yakni menjadi agen Kerajaan Allah yang eskatologis bagi transformasi sosial pada masa kini.”²⁵ Temuan Thomas Ly ini menyatakan jati diri Gereja dimana partisipasi anggota jemaat dalam misi Kerajaan Allah. Maka, dalam penantian kepenuhan kerajaan Allah (*parousia*) dimana kedatangan Yesus Kristus kembali (*eskatologi*), Gereja (= anggota jemaat) memiliki kewajiban dan tanggung jawab eskatologis, yakni sebagai agen Kerajaan Allah yang mentransformasi sosial politik di Indonesia secara berkelanjutan.

Politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota dengan status Negara Kota. Kemudian kata *polis* berkembang menjadi *politeia*, yakni negara dan pemerintahan. Politik yang berkembang di Yunani ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Politik juga dipahami sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sedangkan masa kini politik dipahami sebagai kegiatan bersama dalam sebuah negara untuk mewujudkan kebaikan bersama melalui proses-proses politik yang dibuat dalam sebuah negara.²⁶ Teolog Kristen, John Calvin pernah mengkaji hubungan antara Gereja dan Pemerintah. Ia menandakan bahwa pemerintah menerima otoritas dan mandat dari Tuhan Allah. Eksistensi pemerintahan merupakan rancangan Tuhan Allah untuk memelihara ciptaan-Nya dan ekspresi kedaulatan Tuhan Allah. Sehingga, pemerintah menjalankan fungsi keadilan dan fungsi kesejahteraan (Rm. 13:4). Pemerintah sebagai representasi sejumlah citra pemeliharaan Allah.²⁷ Gereja dan negara menerima mandat dari Tuhan Allah dengan tugas masing-masing. Pembagian tugas tersebut mencegah ancaman konflik antara gereja dan negara mengenai agama. Pemerintah tidak berhak mengurus aktivitas pelayanan gereja dan sebaliknya, sebab negara memiliki bagian mengatur undang-undang dalam bidang lahiriah. Walaupun peran berbeda, namun keduanya saling berdampingan untuk melaksanakan mandat-Nya. Dengan demikian bagi Calvin, jika gereja dan negara melaksanakan mandat Tuhan Allah secara benar, maka terciptanya pemerintahan Allah. Karena itu, pemerintahan Allah mencakup seluruh bidang kehidupan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan Gereja tidak terlepas dari kegiatan

politik praktis oleh oknum-oknum yang terjun dalam dunia politik. Agama menjadi kendaraan politik untuk mencapai suatu tujuan politik kekuasaan oleh pihak tertentu. Mimbar gereja menjadi tempat untuk berkampanye atau pun di sela-sela pelayanan.²⁸ Gereja sebagai karya Tuhan Allah harus memerangi mimbar politik dan berbagai bentuk lainnya. Gereja harus menjalankan tugas misioner agar tetap menjadi Gereja. Gereja hadir untuk memperbaiki kondisi dunia dan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, agar mengalami damai sejahtera Allah. Gereja memberdayakan umat agar memahami cara hidup yang benar, yang mensejahterakan manusia, dan saling hidup bersama. Gereja meneladani Yesus, sebagaimana gembala yang baik (Yoh. 10). Gereja mengenal setiap domba-Nya dan menjadi pemimpin yang berani berkorban di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan Allah. Tujuannya setiap orang mengalami keselamatan secara utuh, yakni: Fisik, mental, sosial, dan rohani.²⁹

Model Etika Kerajaan Allah sebagai Mitigasi Gereja terhadap Isu Politik Identitas

Nilai-nilai etika Kerajaan Allah yang memberdayakan anggota jemaat menghadapi isu Politik Identitas. Orang percaya sebagai mandataris Allah mengerjakan perdamaian dan mendatangkan damai sejahtera (Mat. 5:9). Damai sejahtera yang bersumber dari Allah (1 Tes. 5:23; Ibr. 13:20; Rm. 15:33; 2 Kor. 13:11). Karena itu, Gereja menerapkan keadilan, kerukunan, dan kedamaian sebagai gaya hidup bergereja maupun bermasyarakat.³⁰ Berbicara mengenai Kerajaan Allah berarti kita membicarakan kepemimpinan Allah bagi kehidupan orang percaya yang kemudian menjadi daya mitigasi yang kuat. Model etika demikian: Pertama, pertobatan. Pertobatan merupakan hal penting dalam pimpinan dari Tuhan Allah. Kata “berbahagialah” dalam Matius 5:1-12 tidak terpisahkan dari Injil Matius 4:17 karena terhubung dengan panggilan Yesus kepada orang-orang untuk bertobat. Kata *μετανοεῖτε* (*metanoete*) dalam Injil Matius 4:17 mengandung arti dasar perubahan hati dan pikiran yang mengarah pada perubahan hidup karena pimpinan Tuhan Allah. Pertobatan merupakan perintah yang tidak boleh ditunda oleh seseorang.³¹ Ketika seseorang mengalami perubahan hati, maka ia berani berdampak bagi kehidupan sosial politik. Ia mampu mengelola setiap isu politik yang mengatasnamakan agama secara benar.³²

Kedua, kasih. Yesus mengasihi mereka yang rentan diskriminasi dari masyarakat, misalnya Zakheus si pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kasih Yesus yang memberdayakan hidup seseorang atau sekelompok. Kasih Yesus yang memberi kehidupan yang baru dan kesempatan bagi Zakheus dan orang-orang berdosa untuk menikmati Anugerah Allah.³³ Yesus menegaskan, bahwa kasih adalah identitas sebagai murid Kristus. Kasih kepada sesama bahkan musuh merupakan perintah Yesus. Setiap orang yang mengasihi berasal dari Tuhan Allah dan mengenal-Nya.³⁴ Kasih yang menjadi dasar kuat dalam hidup bersama sebagai bangsa Indonesia yang beragam budaya dan agama. Orang percaya yang hidup dalam kasih mampu mengambil keputusan dan tindakan yang benar.³⁵ Oleh karena dorongan kasih sehingga ia tidak memihak pada orang yang haus kekuasaan, mengeksploitasi orang lain, dan politik uang. Kasih mendorong orang percaya mengedepankan persatuan, keutuhan, keadilan, saling menghormati setiap keunikan masing-masing, dan merayakan keragaman.

Ketiga, lemah lembut. Orang yang dipimpin Tuhan Allah tidak mudah terpengaruh dengan pembalasan dan tindakan anarkis. Sebab, orang yang dipimpin Tuhan Allah menjadi lemah lembut sebagaimana yang ditegaskan Yesus dalam Matius 5:5. Kata yang digunakan dalam Injil Matius 5:5, *πραυς* (*praus*) artinya *gentle, humble, meek*. Kata “*praus*” mengandung makna kerendahan hati seseorang, keramahan dan tindakan kebaikan hati.³⁶ Orang lemah lembut itu rendah hati dan patuh kepada Tuhan Allah. Ia membenci segala bentuk kekerasan. Ia berkepala dingin ketika orang lain terpengaruhi emosi karena ia mampu menguasai diri. Ia lebih suka memberi pengampunan ketika orang lain suka dan merencanakan pembalasan yang jahat.³⁷ Sikap demikian merupakan buah dari kerendahan hati yang menerima didikan dan teguran dari firman Tuhan.³⁸ Dengan demikian, hidup yang lemah lembut tidak terpengaruhi dengan isu SARA yang memecah belah masyarakat.

Keempat, hati yang suci. Ada kebenaran dalam batin bagi orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan Allah. Hidupnya transparan di hadapan Tuhan Allah sehingga ia tidak kotor, cacat, munafik dan merencanakan yang jahat.³⁹ Dengan demikian orang yang dipimpin oleh Tuhan Allah dapat berpolitik secara sehat dan benar. Ia tidak

mencampuri kepentingan karena persamaan suku, agama dan ras dan ia lebih mengutamakan kebenaran.

Kelima, menjadi pembawa damai, *εἰρηνοποιοί* (*eirenopoioi*) dalam Injil Matius 5:9, yakni *pacificatory, peacemaker, loving peace*. Kata ini mengandung makna, bahwa kehadiran seseorang yang mampu menolong orang lain dan lingkungan sekitar mengalami kedamaian, mengutuhkan relasi yang renggang, dan harmonis.⁴⁰ Orang percaya dimanapun ia berada baik dalam persekutuan bergereja maupun bermasyarakat, kehadirannya membawa damai.⁴¹ Oleh karena itu, ketika ia berhadapan dengan perpecahan dan konflik karena Politik Identitas. Maka, ia hadir untuk memulihkan, mempererat, dan memperkokoh relasi antar semua suku, ras, dan agama.

Keenam, integritas. Orang yang dipimpin Tuhan Allah mempunyai integritas, sehingga ada kebenaran dalam hidupnya. Perkataan maupun tindakannya berdasarkan kebenaran. Orang yang memiliki integritas berani melawan isu Politik Identitas yang di dalamnya ada kecurangan, fitnah, diskriminasi, dan kepentingan pihak tertentu. Sebab ia memiliki keyakinan teguh dan mencintai kebenaran. Ia memiliki kejujuran dalam keputusan hidup.⁴²

Model Relasi Yesus terhadap Politik Identitas

Model relasi Yesus bagi Gereja (orang-orang percaya) menjadi sumbangan mitigasi Gereja terhadap Politik Identitas. Gereja merupakan manifestasi dari kerajaan atau pemerintahan Allah. Gereja merupakan bentuk pemerintahan Allah di atas muka bumi⁴³. Lantas bagaimana Gereja (orang-orang percaya) menghadirkan Kerajaan Allah sebagai upaya mitigasi terhadap isu Politik Identitas dalam konteks Pemilu tahun 2024.

Gereja meneladani karya Yesus Kristus. Penulis mengutip karya Tom Hovestol⁴⁴ berisi tentang model-model relasi Yesus berdasarkan nilai-nilai Kerajaan Allah dengan berbagai golongan dalam kesaksian Alkitab. Yesus menyadari, bahwa setiap orang maupun kelompok memiliki perbedaan dan karakteristik, maka memerlukan suatu pendekatan yang beragam dalamewartakan Kerajaan Allah. Pertama, perjumpaan Yesus dengan orang-orang di luar bangsa Yahudi. Yesus menjalin ikatan yang hangat dan tulus dengan mereka. Yesus dekat dengan mereka,

namun Ia mempertahankan integritasnya sebagai Anak Allah. Karena pendekatan demikian, maka orang-orang tertarik dengan Yesus sebagai akibat dari tindakannya. Pelayanan Yesus melalui pendekatan demikian bertujuan menolong orang-orang yang tersesat. Pesan Injil yang diwartakan Yesus mempengaruhi mereka, meskipun Yesus tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Saat itu fokus pelayanan Yesus di tengah orang-orang Yahudi.

Kedua, perjumpaan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang diasingkan dari lingkungan Yahudi. Mereka yang diberikan stigma demikian adalah orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Unik-Nya, Yesus menghargai, menerima, dan menyambut mereka. Model pelayanan Yesus adalah jamuan malam bersama. Yesus membangun relasi dengan mereka dan mengidentikkan dirinya sebagai sesama orang luar, sehingga mereka merasa nyaman bersama Yesus. Yesus hadir bukan menghakimi mereka sebagaimana dilakukan ahli taurat dan orang-orang farisi, melainkan bergaul dan membangun kedekatan emosional. Relasi menjadi model pelayanan Yesus untuk mewartakan Kerajaan Allah dalam cara hidup-Nya.

Ketiga, perjumpaan Yesus dengan orang Samaria. Mereka memadukan budaya dan agama. Unik-Nya, Yesus tidak berperilaku seperti orang Yahudi yang menjauhi orang Samaria. Yesus berjumpa dan justru meminta bantuan mereka, seperti dalam kisah percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Model pendekatan Yesus, yakni menunjukkan keramahtamahan dengan orang asing. Ada penerimaan dan kasih yang diberikan Yesus kepada perempuan Samaria. Pendekatan Yesus menawarkan keselamatan secara universal kepada bangsa-bangsa lain, seperti Samaria. Keramahtamahan Yesus merangkul keragaman sekaligus menghargai orang asing.

Keempat, perjumpaan Yesus dengan orang-orang Saduki. Orang Saduki berpegang teguh pada tradisi dan agama. Karena itu, mereka mengklaim sebagai orang atau kelompok yang paling saleh. Uniknya berbeda dengan golongan sebelumnya, pendekatan Yesus adalah berani menyatakan kebenaran karena dorongan kasih Allah. Dorongan kasih Allah adalah mencintai kebenaran sejati. Yesus berdiri dengan keyakinannya tanpa terpengaruh dengan orang Saduki. Yesus berargumentasi berdasarkan sumber yang terpercaya dan dapat diterima orang Saduki sehingga Injil-Nya diterima oleh mereka.

Kelima, perjumpaan Yesus dengan orang Farisi yang tergolong melakukan kebaikan. Mereka adalah anggota kelompok Hillel. Berbeda dengan golongan lainnya, Yesus mudah membangun hubungan dengan mereka. Akan tetapi, mereka cenderung menekankan pada kesempurnaan hidup. Karena itu, model pendekatan Yesus, yakni menekankan refleksi diri agar memahami kesempurnaan hanya bersumber dari Allah. Mereka merefleksikan diri untuk menemukan kehendak Allah dan tidak menggunakan standar kesempurnaan mereka.

Keenam, perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi pengikut Shammai. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok pencari kebenaran. Mereka suka berkumpul di tiap rumah untuk membaca Alkitab dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan Yesus dengan mereka adalah memberikan pernyataan kebenaran yang meresahkan mereka. Yesus menyatakan, bahwa Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tujuan pendekatan Yesus agar mereka terbuka dengan kebenaran di luar dari kelompok mereka dan mengenal Yesus secara pribadi.

Ketujuh, perjumpaan Yesus dengan orang Zelot yang fanatik. Perjumpaan ini terjadi dalam ruang publik dan politik. Yesus berani bersaksi tentang Kerajaan Allah. Karena itu, mereka menganggap Yesus akan merebut kekuasaan, sehingga mereka menolak karya dan ajaran dari Yesus. Bahkan, Yesus diadili dan mati di kayu salib dengan pernyataan sebagai raja orang Yahudi. Kisah yang lain dalam perjumpaan Yesus dengan Saulus, seorang pemburu dan pembunuh para pengikut Yesus. Perjumpaan itu mengubah identitas dan kehidupan Saulus menjadi baru. Identitas namanya dari Saulus berubah menjadi nama Paulus, dan dengan identitas baru sebagai milik kepunyaan Allah, Ia menjalankan misi pekabaran Injil.

Kedelapan, orang-orang Eseni. Kelompok ini tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung. Kelompok ini suka disiplin rohani dan hidup bertapa. Walaupun demikian, mereka mendengar cerita dan mukjizat Yesus dari orang lain. Unik-Nya, Yesus menginginkan setiap pengikut-Nya meneladani orang-orang Eseni yang menggumuli pemenuhan hukum-Nya dan pekerjaan-Nya.

Berdasarkan paparan di atas, maka konteks Yesus yang dekat dengan konteks isu Politik Identitas adalah konteks perjumpaan Yesus dengan orang-orang Zelot. Yesus tidak anti dengan politik, malah Yesus juga berpolitik tentang Kerajaan Allah. Politik Kerajaan Allah adalah bukan meraih kekuasaan dan kedudukan, melainkan

politik Yesus menghadirkan keselamatan, kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera. Karena itu, Yesus berani menyatakan kebenaran, tidak kompromi dengan berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan, mempertahankan integritas-Nya sebagai anak Allah, dan mampu membangun relasi dengan semua golongan yang memiliki kepentingan tertentu. Model relasi demikian yang sangat penting diterapkan oleh orang-orang percaya sebagai mitigasi terhadap isu Politik Identitas, baik pra politik 2024 dan pasca politik.

KESIMPULAN

Politik Identitas mengancam keutuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena menimbulkan permusuhan, perpecahan, mengancam pluralisme, membentuk polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik bagi masyarakat Indonesia, termasuk anggota jemaat. Kontribusi artikel ini adalah anggota jemaat menyikapi tantangan Politik Identitas berdasarkan nilai etika Kerajaan Allah dan meneladani model relasi Yesus. Nilai etika Kerajaan Allah yang dimaksudkan, yakni pertobatan, kasih, lemah lembut, hati yang suci, pembawa damai, dan berintegritas. Anggota jemaat yang menanamkan nilai etika Kerajaan Allah, maka seluruh hidupnya dipimpin oleh Allah dan kehadirannya menghadirkan Kerajaan Allah dalam seluruh segi kehidupannya termasuk dalam konteks berdemokrasi dan berpolitik baik pra dan pasca Pemilu. Sedangkan model relasi Yesus yang berdasarkan nilai etika Kerajaan Allah menjadi fondasi anggota jemaat menghadapi tantangan Politik Identitas, yakni anggota jemaat beraniewartakan Kerajaan Allah, yakni menyatakan kebenaran, tidak kompromi dengan segala bentuk kejahatan dan kekerasan dalam berdemokrasi dan berpolitik pra dan pasca Pemilu. Anggota jemaat berani membangun relasi dengan setiap kelompok orang dengan kepentingan tertentu sekaligus mempertahankan integritas sebagai anak Allah terhindar dalam politik atas nama agama, eksploitasi orang lain dengan isu SARA, menggunakan politik uang, dan menyebarkan berita hoaks. Dengan demikian, penerapan nilai etika Kerajaan Allah dan model relasi Yesus yang memberdayakan setiap anggota jemaat untuk kritis, selektif, meminimalisir pengaruh dan dampak dari Politik Identitas baik pra dan pasca Pemilu 2024 maupun Pemilu yang akan mendatang.

Endnotes

- ¹ Ridwan Wijayanto Said, "Fenomena Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2023): 45, 49, <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/233/177>.
- ² Zahrotunnimah, "Keniscayaan Politik Identitas dari Suatu Bangsa dan Agama," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020): 11, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15529>.
- ³ Said, "Fenomena Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia." 48-49.
- ⁴ Idrus Ruslan, "Politik Identitas dan Tantangan Hubungan antar Agama di Indonesia," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2022): 218-219, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/14755>.
- ⁵ I Putu Sastra Wingarta Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, Reda Wicaksono, "Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 123, <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/419>.
- ⁶ Nurhadi Sucahyo, "NU dan Muhammadiyah Fokus pada Isu Praktik Politik Identitas di 2024" (Learning English, 2023), <https://www.voaindonesia.com/a/nu-dan-muhammadiyah-fokus-pada-isu-praktik-politik-identitas-di-2024-/6933115.html>.
- ⁷ Leli Salman Al-Farisi, "Politik Identitas: Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila," *Jurnal Aspirasi* 10, no. 2 (2018): 82-83, 84-85, 86-87, 89, <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/54>.
- ⁸ Wasinthon Fernando Sianipar Pardomuan Munthe, Janhotner Saragih, "Politik Identitas: Suatu Tinjauan Etis Teologis terhadap Dinamika Politik Identitas dan Peran Gereja GKPI Sukarame Baru dalam Politik Identitas," *Jurnal Sabda Akademika* 2, no. 2 (2022): 11, <https://jurnal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSAK/article/view/87/89>.
- ⁹ Djoys Anneke Rantung, "Teologi Politik untuk Keadilan: Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas," *Jurnal Voice of Wesley* 2, no. 1 (2018): 11, <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/21>.
- ¹⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 256, <https://ejournal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/93/88>.
- ¹¹ Ibid.
- ¹² Zahrotunnimah, "Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 2, no. 10b (2018): 94, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/9437>.
- ¹³ Al-Farisi, "Politik Identitas: Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila," 84.
- ¹⁴ John Musa Renhoard, "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi," *SOCIETAS DEI* 6, no. 1 (2019): 121-122, <https://media.neliti.com/media/publications/344796-politik-identitas-era-orde-baru-di-indon-67ecb06a.pdf>.
- ¹⁵ Al-Farisi, "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila," 84.
- ¹⁶ Ibid.
- ¹⁷ Al-Farisi, "Politik Identitas: Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila", 83.
- ¹⁸ Ardito Ramadhan, "Pemilu 2024 Diprediksi Masih Diwarnai Politik Identitas" (Kompas.com, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/15243491/Pemilu-2024-diprediksi-masih-diwarnai-politik-identitas>.
- ¹⁹ Al-Farisi, "Politik Identitas: Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila," 86-87.
- ²⁰ Roy Charly Sipahutar, "Teokrasi dan Demokrasi (Komparasi Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci dengan Demokrasi Langsung di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Tangkole Putai* 15, no. 2 (2018): 87-90, <https://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/22>.
- ²¹ Ambrosius Setiadvento Haward, "Kerajaan Allah sebagai Landasan bagi Relasi antara Gereja dan Dunia dalam Teologi Wolfhart Pannenberg," *Theologia in Loco* 3, no. 2 (2021): 224, 238, <https://doi.org/10.55935/thilo.v3i2.227>.

- ²² Fereddy Siagian dan Fredy Simanjuntak, "Menelisis Makna Metafora Kerajaan Allah dalam Kehidupan Gereja: Antara Utopia atau Existensi.," *Magnum Opus: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 2, no. 2 (2021): 104–105, <https://e-journal.sttikat.ac.id/index.php/magnumopus/article/view/93>.
- ²³ Narsisius Atas dan Sarina Daiman, "Menjadi Saksi Kerajaan Allah di Tengah Pandemi Covid-19 dan Arus Digitalisasi," *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 7, no. 2 (2022): 158–160, <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/359/177>.
- ²⁴ Elisua Hulu, "Misi Kerajaan Allah dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini," *Jurnal Missio Cristo* 3, no. 2 (2021): 129, <https://e-journal.sttsgi.ac.id/index.php/jmc/article/view/19>.
- ²⁵ Thomas Ly, "Kerajaan Allah dan Transformasi Sosial: Dialektika Kedatangan Kerajaan Allah dan Implikasi Masa Kini," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 8, no. 2 (2024): 760, 771, 775, <https://e-journal.sttintheos.ac.id/index.php/dunamis/article/view/1051/441>.
- ²⁶ Alfons Renaldo Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin mengenai Politik Praktis dalam Pelayanan Gereja," *Thronos: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 116–117, 124–125, <https://ojs.bmptkki.org/index.php/thronos/article/view/7>.
- ²⁷ Antonius Steven Un, "Pendasaran Teologis bagi Pemikiran Politik John Calvin," *Jurnal Verbum Christi* 2, no. 1 (2015): 129–130, <https://verbum.sttrii.ac.id/index.php/VC/article/view/23>.
- ²⁸ Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin mengenai Politik Praktis dalam Pelayanan Gereja," 116–117, 124–125.
- ²⁹ Janter Rano Baki, Maria R. A. Pada, Yuda D. Hawu Haba, Endang Damaris Koli, "Analisis Historis Teologis terhadap Peran GMTIT Galed Kelapa Lima bagi Moralitas Sosial di Kelurahan Kelapa Lima," *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual* 15, no. 1 (2023): 79–80, 88–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.47154/sjtpk.v15i1.181>.
- ³⁰ Yonatan Alex Arifianto dan Carolina Etnasari Anjaya, "Mengembangkan Misi Gereja dalam Bingkai Moderasi Beragama," *Thronos: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 5–6, <https://ojs.bmptkki.org/index.php/thronos/article/view/27>.
- ³¹ Armin Sukri dan Mikha Agus Widiyanto, "Perwujudan Kebahagiaan dalam Relasi Interpersonal: Implementasi Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Matius 5:3-9," *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 1 (2022): 181, 182–183, 184–185., <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/547/206>.
- ³² Yosua Budi Ristiono, "Perbandingan Gagasan Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik," *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 103, <https://jurnalstabdigusti.ac.id/index.php/Messengers/article/view/33>.
- ³³ Esti Regina Boiliu, "Literasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen," *PEADA: Jurnal Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022): 127, <https://peada.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatapeada/article/view/69>.
- ³⁴ Ezra Tari, "Mengembangkan Moderasi Beragama di Kalangan Generasi Milenial melalui Perspektif Perjanjian Baru," *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 1 (2022): 117, <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/474>.
- ³⁵ Hengki Wijaya, *Tinjauan Biblika Tentang Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Injil Matius 5:3-12 dan Implementasinya bagi Spiritualitas Gereja Masa Kini* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Repository, 2018), <https://repository.stjaffray.ac.id/publications/269004/tinjauan-biblika-tentang-etika-kerajaan-allah-berdasarkan-injil-matius-53-12-dan>.
- ³⁶ Widiyanto, "Perwujudan Kebahagiaan dalam Relasi Interpersonal: Implementasi Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Matius 5:3-9," 182–183.
- ³⁷ Kuntjoro Tjondro, "Kepemimpinan Kerajaan Allah Berdasarkan Ucapan Bahagia Ajaran Yesus Kristus Matius 5:3-12," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 8, no. 2 (2019): 69–70, 81–82, <https://journal.sttni.ac.id/index.php/SDJT/article/view/51>.
- ³⁸ Wijaya, "Tinjauan Biblika tentang Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Injil Matius 5:3-12 dan Implementasinya bagi Spiritualitas Gereja Masa Kini," 8.
- ³⁹ Wijaya, 10.
- ⁴⁰ Widiyanto, "Perwujudan Kebahagiaan dalam Relasi Interpersonal: Implementasi Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Matius 5:3-9," 184–185.
- ⁴¹ Wijaya, "Tinjauan Biblika tentang Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Injil Matius 5:3-12 dan Implementasinya bagi Spiritualitas Gereja Masa Kini," 10.
- ⁴² Tjondro, "Kepemimpinan Kerajaan Allah Berdasarkan Ucapan Bahagia Ajaran Yesus Kristus Matius 5:3-12," 81–82.

⁴³ Hulu, "Misi Kerajaan Allah dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini," 129.

⁴⁴ Janter Rano Baki, "A Response to the Plurality of Spirituality of Pietistic Prayer Fellowships and Gereja Masehi Injili Di Timor : A Historical-Theological Study". *Theologia in Loco* 5, no. 1 (2023): 41-44. <https://doi.org/10.55935/thilo.v5i1.265>.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik Identitas: Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila." *Jurnal Aspirasi* 10, no. 2 (2018): 82–83, 84–85, 86–87, 89. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/54>.
- Anjaya, Yonatan Alex Arifianto dan Carolina Etnasari. "Mengembangkan Misi Gereja dalam Bingkai Moderasi Beragama." *Thronos: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 5–6. <https://ojs.bmptkki.org/index.php/thronos/article/view/27>.
- Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, Reda Wicaksono, I Putu Sastra Wingarta. "Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 123. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/419>.
- Boiliu, Esti Regina. "Literasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen." *PEADA: Jurnal Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022): 127. <https://peada.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatapeada/article/view/69>.
- Daiman, Narsisius Atas dan Sarina. "Menjadi Saksi Kerajaan Allah di Tengah Pandemi Covid-19 dan Arus Digitalisasi." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 7, no. 2 (2022): 158–160. <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/359/177>.
- Haward, Ambrosius Setiadvento. "Kerajaan Allah sebagai Landasan bagi Relasi antara Gereja dan Dunia dalam Teologi Wolfhart Pannenberg." *Theologia in Loco* 3, no. 2 (2021): 238, 224. <https://www.theologiainloco.com/ojs/index.php/sttjournal/article/view/227>.
- Hulu, Elisua. "Misi Kerajaan Allah dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini." *Jurnal Missio Cristo* 3, no. 2 (2021): 126, 129. <https://e-journal.sttsgi.ac.id/index.php/jmc/article/view/19>.
- Ly, Thomas. "Kerajaan Allah dan Transformasi Sosial: Dialektika Kedatangan Kerajaan Allah dan Implikasi Masa Kini." *Dunamis: Jurnal Teologi dan*

- Pendidikan Kristen* 8, no. 2 (2024): 760, 771, 775. <https://e-journal.sttintheos.ac.id/index.php/dunamis/article/view/1051/441>.
- Pardomuan Munthe, Janhotner Saragih, Wasinthon Fernando Sianipar. “Politik Identitas: Suatu Tinjauan Etis Teologis terhadap Dinamika Politik Identitas dan Peran Gereja GKPI Sukarame Baru dalam Politik Identitas.” *Jurnal Sabda Akademika* 2, no. 2 (2022): 11. <https://jurnal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSAB/article/view/87/89>.
- Ramadhan, Ardito. “Pemilu 2024 Diprediksi Masih Diwarnai Politik Identitas.” Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/15243491/pemilu-2024-diprediksi-masih-diwarnai-politik-identitas>.
- Rano Baki, Janter. “A Response to the Plurality of Spirituality of Pietistic Prayer Fellowships and Gereja Masehi Injili di Timor : A Historical-Theological Study”. *Theologia in Loco* 5, no. 1 (2023): 41-44. <https://doi.org/10.55935/thilo.v5i1.265>
- Rano Baki, Janter., Maria R. A. Pada, Yuda D. Hawu Haba, Endang Damaris Koli. “Analisis Historis Teologis terhadap Peran GMT Galed Kelapa Lima bagi Moralitas Sosial di Kelurahan Kelapa Lima.” *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual* 15, no. 1 (2023): 79–80, 88-89. <https://ejournal.stte.ac.id/index.php/scripta/article/view/181>.
- Rantung, Djoys Anneke. “Teologi Politik untuk Keadilan: Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas.” *Jurnal Voice of Wesley* 2, no. 1 (2018): 11. <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/21>.
- Renhoard, John Musa. “Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi.” *SOCIETAS DEI* 6, no. 1 (2019): 121–122. <https://media.neliti.com/media/publications/344796-politik-identitas-era-orde-baru-di-indon-67ecb06a.pdf>.
- Ristiono, Yosua Budi. “Perbandingan Gagasan Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik.” *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 103. <https://jurnalsttabdigusti.ac.id/index.php/Messengers/article/view/33>.
- Ruslan, Idrus. “Politik Identitas dan Tantangan Hubungan antar Agama di Indonesia.”

- Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2022): 218–219.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/14755>.
- Said, Ridwan Wijayanto. “Fenomena Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia.” *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2023): 45, 48, 49.
<https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/233/177>.
- Simanjuntak, Fereddy Siagian dan Fredy. “Menelisik Makna Metafora Kerajaan Allah dalam Kehidupan Gereja: Antara Utopia Atau Existensi.” *Magnum Opus: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 2, no. 2 (2021): 104–105. <https://ejournal.sttikat.ac.id/index.php/magnumopus/article/view/93>.
- Sipahutar, Roy Charly. “Teokrasi dan Demokrasi (Komparasi Reflektif Teokrasi Israel Kitab Suci dengan Demokrasi Langsung di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Tangkole Putai* 15, no. 2 (2018): 87–90.
<https://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/22>.
- Sucahyo, Nurhadi. “NU Dan Muhammadiyah Fokus pada Isu Praktik Politik Identitas di 2024.” *Learning English*, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/nu-dan-muhammadiyah-fokus-pada-isu-praktik-politik-identitas-di-2024-/6933115.html>.
- Tampenawas, Alfons Renaldo. “Pandangan Eklesiologi Calvin mengenai Politik Praktis dalam Pelayanan Gereja.” *Thronos: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 116–117, 124–125.
<https://ojs.bmptkki.org/index.php/thronos/article/view/7>.
- Tari, Ezra. “Mengembangkan Moderasi Beragama di Kalangan Generasi Milenial melalui Perspektif Perjanjian Baru.” *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 1 (2022): 117. <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/474>.
- Tjondro, Kuntjoro. “Kepemimpinan Kerajaan Allah Berdasarkan Ucapan Bahagia Ajaran Yesus Kristus Matius 5:3-12.” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 8, no. 2 (2019): 69–70, 81–82.
<https://journal.sttni.ac.id/index.php/SDJT/article/view/51>.
- Un, Antonius Steven. “Pendasaran Teologis bagi Pemikiran Politik John Calvin.”

Jurnal Verbum Christi 2, no. 1 (2015): 129–130.
<https://verbum.strii.ac.id/index.php/VC/article/view/23>.

Widiyanto, Armin Sukri dan Mikha Agus. “Perwujudan Kebahagiaan dalam Relasi Interpersonal: Implementasi Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Matius 5:3-9.” *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 1 (2022): 181, 182–183, 184-185. <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/547/206>.

Wijaya, Hengki. *Tinjauan Biblika Tentang Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Injil Matius 5:3-12 Dan Implementasinya Bagi Spiritualitas Gereja Masa Kini*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Repository, 2018. <https://repository.sttjaffray.ac.id/publications/269004/tinjauan-biblika-tentang-etika-kerajaan-allah-berdasarkan-injil-matius-53-12-dan>.

Zahrotunnimah. “Keniscayaan Politik Identitas dari Suatu Bangsa dan Agama.” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020): 11. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15529>.

———. “Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia.” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 2, no. 10b (2018): 94. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/9437>.

Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 256. <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/93/88>.